

**PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA**  
**(Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)**

**Oleh :**

**Muhammad Rosyidi**

**Pembimbing : Nur Azlina dan Adhitya Agri Putra**

*Faculty of Economics and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email: [rosyidim35@yahoo.com](mailto:rosyidim35@yahoo.com)

*The influence of transparency, competence and internal control system on village government accountability in managing the village funds (Empirical Study in all villages in the salo sub-district of Kampar)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research was to identify and analyze about : 1) the effect Effect of transparency on village government accountability in management of village fund. 2) Effect of competence on village government accountability in management of village fund. 3) Influence of internal control system on village government accountability in management of village fund. This study was conducted in all villages in Salo Sub-district, Kampar District, which amounted to 6 villages. Data used in this research is primary data with questionnaire as instrument. The method used in sample selection is purposive sampling. The number of samples in this study was 123 respondents. Hypothesis test used in this research is statistical t test. Data analyze technique used in this research is multiple linear analyze using Statistical product and service solution (SPSS) version 20.0. The results show that transparency, competence and internal control system have a positive effect on village government accountability in managing the village funds.*

*Keywords : transparency, competence, influence of internal control system, accountability*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu

bidang ilmu akuntansi yang menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan

sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi. Menurut Dwipayana, (2003:6), Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015:13).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar

pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Berbagai peraturan tersebut tampaknya belum mampu mengembalikan pada eksistensi sejati desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tanpa meninggalkan adat istiadat (Risadi 2015). Pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewisdomahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan UU 6/2014).

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2001). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai

dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa wujud dari pelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016, (1) Bahwa Keuangan Desa termasuk Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (2) Seluruh Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, (3) Seluruh Kegiatan yang bersumber dana dari Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum, (4)

Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh Kepala Desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagaimana yang dilansir dalam berita KAMPAR, Seorang warga Desa Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jumat (13/5/2016) di Bangkinang mengatakan, pengerjaan jalan sepanjang 200 meter yang dibangun menggunakan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 di Dusun Sialang RT 01/RW 01, diduga bermasalah. Dirinya menilai pengerjaan jalan itu asal-asalan. Kemudian, meski hingga kini belum dilakukan serah terima antara pihak pemborong ke pihak desa, namun jalan yang dibangun pada Januari 2016 itu sudah mulai rusak. Dari pantauan wartawan, Jumat (13/5/16), proyek yang menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 200 juta itu, terlihat sudah banyak yang pecah, bahkan ada juga yang patah.

Menurut informasi yang dihimpun dari warga setempat, proyek ini dikerjakan tanpa menggunakan PPTK. Padahal dana ini berasal dari ADD tahun 2015. Seharusnya dana itu disilpakan, tapi Pjs Kades Salo kala itu, konon, malah menggunakan anggaran itu untuk membuat jalan. Padahal, saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Jefry Noer sudah banyak menonaktifkan kepala desa karena dinilai gagal dalam melaksanakan amanah sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing. Tapi anehnya, para kepala desa bukannya malah berhati-hati dalam menjalankan amanah tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa tahun 2015, Jasman, malah mengaku laporan masyarakat tersebut belum sampai ke

pihaknya. Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar hendak dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, terkait banyaknya laporan masyarakat penggunaan anggaran dana desa yang bersumber anggaran dari APBD Propinsi Riau, tahun anggaran 2015 lalu belum memberikan jawaban.

Pada prinsipnya, dana desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Prioritasnya untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan guna mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dalam aplikasinya, bisa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu bisa juga untuk pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan keputusannya, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Namun tidak hanya itu sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa. Dengan mengacu pada penelitian dilakukan oleh (Nofianto dan Suseno 2014); (Jermias dan Setiawan 2008) serta melihat fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti merumuskan faktor-faktor kondisional yang terdiri atas kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian. Kompetensi aparatur mejadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Kondisi serupa dipertegas oleh (Leunget *al.*, 2009) yang menjelaskan mengenai pentingnya peran auditor internal dalam mendukung *corporate governance* sebuah entitas. Namun agar peran auditor internal berhasil guna mendukung *corporate governance* maka diperlukan kompetensi yang cukup dalam menjamin keberhasilan manajemen dan integritas dalam suatu entitas.

Faktor ketiga dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah agar setiap element yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber yang diperoleh di BPK terdapat hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Kampar masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi sistem

pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengendalian intern pemerintahan masih kurang efisien dan efektif.

Sebagaimana yang dijelaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui (BPMPD) tidak tau atas temuan BPK Perwakilan Pekanbaru atas hasil audit tanggal 10 Juni 2016 Nomor 11.C/LHP/XVIII.PEK/06/2016 terhadap 13 desa di Kampar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan masuk dalam temuan BPK Perwakilan Riau sebesar Rp.3.609.298.625,00. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pasal desa 27 poin A yang menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. Namun dari hasil temuan BPK terkait penggunaan dana desa tidak dapat dipantau, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan peruntukannya. Kepala BPMD Kampar Surya Budi, mengaku dirinya tidak pernah tahu, soal adanya temuan BPK Perwakilan Riau terhadap 13 desa yang dimaksud dalam laporan hasil audit tersebut. Sementara dalam sebuah LH BPK Perwakilan Riau tertulis, atas permasalahan tersebut Kepala BPMPD Kampar menyetujui temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK itu.

Pada temuan tersebut memerintahkan Kepala BPMPD Kampar untuk segera membina dan pertanggung jawaban penggunaan belanja bantuan keuangan desa yang belum menyampaikan laporannya. Namun ketika akan dikonfirmasi pada Kepala BPMPD Kampar Surya Budi, belum berhasil dimintai keterangan. Menurut Ali Halawa selaku perwakilan LSM LIRA Kampar meminta penegak hukum segera periksa kepala BPMPD Kampar Surya Budi bersama Kepala Desa dan Inspektorat Kampar secepatnya (KAMPAR, RIAUGREEN.COM).

Faktor Transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian yang telah

diuraikan sebelumnya diduga dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparaturnya pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian *accounting infrastructure*, *accounting culture*, dan *accounting practice* berdasarkan *accountability framework* yang dikembangkan oleh (Iyoha dan Oyerinde 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan Sari (2012) pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan, dengan arah hubungan positif. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi. Menurut Primayani (2014) menyatakan secara parsial dapat diketahui bahwa Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung. Hal ini berarti semakin tinggi Pengendalian internal maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Klungkung.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arif widyatama dkk (2017) serta mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2016) tentang Pengendalian Internal. Namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Arif Widyatama (2017) adalah :

- 1) Pada penelitian sebelumnya, objek yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Sigi, sedangkan pada penelitian ini, wilayah yang menjadi objek adalah Beberapa Desa di Kabupaten Kampar.
- 2) Pada penelitian sebelumnya, variabel yang digunakan adalah kompetensi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan transparansi sebagai variabel independen.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi serta ketidak konsisten penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar? 2) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar? 3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1) Menguji dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 2) Menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 3) Menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian internal terhadap akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

### Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana Pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

### **Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

### **Pengertian Transparansi**

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18).

### **Pengertian Kompetensi**

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Airswort, Smith dan Millership (2007:73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangaani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.

### **Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian.
- 2) Penilaian risiko.
- 3) Kegiatan pengendalian.
- 4) Informasi dan komunikasi.

- 5) Pemantauan pengendalian intern.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan Salo. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang terdiri dari aparatur kecamatan, aparatur desa, masyarakat dan badan pengawas pengelolaan dana desa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006:123).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akandiamambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah desa yang melaksanakan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Dari setiap Desa akan diambil 20 responden, dan dari aparatur kecamatan 2 responden, masyarakat, anggota BPD, 1 pengawas atau pengelola dana desa yang memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu:

Camat Kecamatan Salo, Sekretaris Camat Kecamatan Salo, Kabid Pengurus dana desa, Kepala Desa, BPD 3 orang, Sekretaris desa 1 orang, 5 Pegawai desa, Masyarakat tiap desa 10 orang. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 123 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap 110 responden yang diambil dari setiap desa yang ada di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	110	12	25	19,13	2,720
Kompetensi	110	12	30	23,23	3,028
Sistem Pengendalian Internal	110	30	75	59,01	8,122
Akuntabilitas	110	29	50	38,98	4,639
Valid N (listwise)	110				

Sumber : Data Olahan, 2018

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

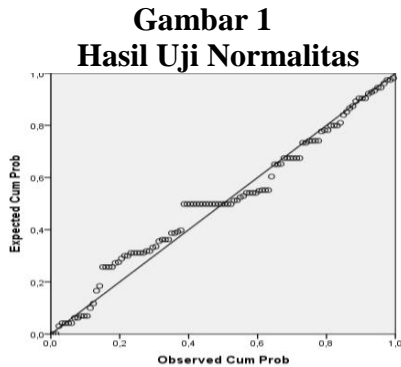
Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reabilitas	Kesimpulan
Transparansi	0.814	0,6	Reliabel
Kompetensi	0.819	0,6	Reliabel
Sistem pengendalian internal	0.968	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0.894	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2018



### Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan, 2018

Untuk memperkuat dan memastikan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, maka dalam penelitian ini juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

**Tabel 3**  
Hasil Uji Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,66248266
Most Extreme Differences	Absolute	0,116
	Positive	0,084
	Negative	-0,116
Kolmogorov-Smirnov Z		1,221
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,102

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2018

### Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4**

Model	Collinearity Statistics		KETERANGAN
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	Transparansi	0,483	2,070
			Bebas multikolinearitas

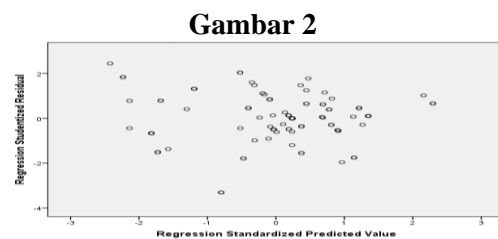
Kompetensi	0,228	4,389	Bebas multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,246	4,070	Bebas multikolinearitas

Sumber : Data Olahan, 2018

Pada Tabel 4 dari hasil perhitungan analisis data di atas, diperoleh nilai VIF untuk variabel transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 atau nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar 2 sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Gambar 2 di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini terangkum pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Hasil
Transparansi (X <sub>1</sub> )	4,663	1,9817	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 4,663 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t<sub>tabel</sub> pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan  $n - k - 1: \alpha/2 = 110 - 3 - 1: 0,05/2 = 106 : 0,025 = \pm 1,9817$  dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t<sub>hitung</sub> (4,663) > t<sub>tabel</sub> (1,98) dan Sig (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian maka hipotesis pertama diterima.

### Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini terangkum pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Kedua**

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Hasil
Kompetensi (X <sub>2</sub> )	5,264	1,9817	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 5,264 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t<sub>tabel</sub> pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan  $n - k - 1: \alpha/2 = 110 - 3 - 1: 0,05/2 = 106 : 0,025 = \pm 1,9817$  dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t<sub>hitung</sub> (5,264) > t<sub>tabel</sub> (1,9817) dan Sig (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian maka hipotesis kedua diterima.

### Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini terangkum pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Ketiga**

Variabel Independen	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig	Hasil
Sistem pengendalian internal (X <sub>3</sub> )	5,629	1,9817	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 5,629 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t<sub>tabel</sub> pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan  $n - k - 1: \alpha/2 = 110 - 3 - 1: 0,05/2 = 106 : 0,025 = \pm 1,9817$  dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t<sub>hitung</sub> (5,629) > t<sub>tabel</sub> (1,9817) dan Sig (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian maka hipotesis kedua diterima.

### Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi :

**Tabel 8**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Squared	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,934 <sup>a</sup>	0,872	0,868	1,686	1,784

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,872. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y adalah sebesar 87,2%. Sedangkan sisanya 12,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti komitmen organisasi, kinerja aparatur desa dan sebagainya.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo. Artinya semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi di dalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa.
3. Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo. Artinya sistem pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah desa.

### **Keterbatasan Penelitian**

penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun demikian diharapkan memberikan bahan

pertimbangan dalam praktek dan pengembangan berikutnya, beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden tanpa didampingi peneliti secara langsung, sehingga jika ada pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden, responden tidak dapat mengkonfirmasi kepada peneliti, di khawatirkan hal tersebut akan mengakibatkan informasi yang diperoleh kurang tepat.
2. Sampel dalam penelitian ini Camat Salo, Sekretaris Camat, Kabid Pengelola dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Staff Desa dan masyarakat karena dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa, serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mendampingi seluruh responden untuk mengisi kuesionernya agar informasi yang didapatkan responden lebih tepat
2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup objek penelitian diperluas dan menambah responden yang terkait dalam hal akuntabilitas atau pertanggungjawaban alokasi dana desa sehingga mungkin saja hasilnya berbeda. Dan data sampel yang dipilih harus sesuai dengan kinerja dan fungsinya
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana seperti : pemanfaatan teknologi, komitmen organisasi dan variabel lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aikins, Stephen K. 2011. An Examination of

- Government Internal Audit's Role in Improving Financial Performance. *Journal of Public Finance and Management*, 11 (4), pp. 306-337.
- Ainswort, Murray., N. Smith., dan A. Millership. 2007. *Managing Performance Managing People*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Aliyah, Siti, 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8. No. 2, Mei 2012.
- Arif Widyatama dkk, 2017. Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.2.no.2. 2017
- Arzarofatma, 2015. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten kampar. *Skripsi*. UR
- Azlina, Nur ,Dkk 2017, "The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Village in Coastal Areas In Riau". *International Journal of Economic Research*.
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Diamond, Jack, 2002, "Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?". *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department*.
- Fajri, Rahmi. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.3, No.7, Hal.1099-1104.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir)*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.14, No.3. Hal.321-336.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, A. dan Theresia D. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta..
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis : Bagaimana*

- Meneliti dan Menulis Tesis?*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1, Mei 2006.
- Musthofa, Anis Iqbal. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.1.No.1, Agustus 2012
- Nugroho, Bhuono Agung, 2003. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurhayani, Hani, 2013. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey pada Seluruh Dinas Pemerintahan Kota Bandung) , Skripsi, Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Pasaribu, Frans Judika, 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi* Universitas Sumatra Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Daam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Poae, Aries Dedy. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2.No.1. 2013
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014.
- Primayani, dkk. 2014. Pengaruh pengendalian internal, *value for money*, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan(studi empiris pada skpd di pemerintahan daerah kabupaten klungkung). Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahmawati, N. E. 2013. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder. Tesis, Universitas Gadjah Mada. Rakhman, Muhammad Arief, 2013. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Robbins, S. P. 2007. *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta:PT. Indeks . Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rohman, Abdul, 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Sagala, Marjuki, 2011. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah samosir. *Skripsi* Universitas Sumatra Utara.
- Sari, Diana, 2012. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Dalam *Prosiding ISSN-2252-3936*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Sartika D.K., W. Cipta., dan I W. Bagia. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *E- Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen, Vol 2.*
- Sastra, Yuni, 2013. pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota medan. *Skripsi* Universitas Medan.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, Hadi, 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.1. No 1. 2009.
- Suresh, Shende dan Tony Bennet, 2004. Concept Paper 2: *Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Welch, E. W., C. H. Charles dan M. J. Moon. 2004. Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15, 371–391.
- Zirman, Edvan, dan Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* Volume 18.
- Zyen, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1): 52-62.
- [www.bpk.com](http://www.bpk.com)  
(<http://pekanbaru.bpk.go.id>).